



DP3APPKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

● ● ●
2025



📍 Jl. Lawu No.167 Karanganyar
🌐 dp3appkb.karanganyarkab.go.id
☎ 0271495063 Fax 495063

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Isu-isu Strategis.....	3
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	5
1.4 Sistematika Penulisan	10
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024	11
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD	11
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Tujuan,Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	14
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	16
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	18
2.4 Perjanjian Kinerja	25
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	32
BAB III	34
AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	34
3.2 Realisasi Anggaran	49
3.3 Inovasi.....	56
3.4 Penghargaan.....	57
BAB IV	59
PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Rekomendasi.....	60
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Gol/Ruang	6
Tabel 1. 3 Sumber Daya Modal	6
Tabel 1. 4 Data Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.....	8
Tabel 1. 5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	11
Tabel 1. 6 Tindak Lanjut Rekomendasi LkjIP Tahun 2024.....	12
 Tabel 2.1 Tujuan, sasaran dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.....	 15
Tabel 2.2 indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	17
Tabel 2.3 Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.....	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.....	26
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.....	27
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	28
 Tabel 3.1 Skala Pengukuran Perangkat Kinerja.....	 34
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	35
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025	36

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2023-2025 ..	38
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2025 dengan Target Renstra 2024 - 2026	40
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional/Regional.....	41
Tabel 3.7 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2025..	43
Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2025.....	46
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program.....	47
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak	58
Gambar 3.2 Piagam Penghargaan Klinik Swasta	58

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun *outcome*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kami berharap agar LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Karanganyar, Februari 2026
KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR



SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680604 199503 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113) dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki tantangan dan permasalahan yang harus dituntaskan di Kabupaten Karanganyar antara lain terkait pemberdayaan perempuan di semua aspek bidang pembangunan, Perlindungan dan layanan penanganan kekerasan Perempuan dan Anak secara komprehensif dan lintas sektor, Pembangunan Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga yang sinergis, berkelanjutan dan lintas sektor.

Laporan pengukuran kinerja sebagai upaya untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan keberhasilannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi).

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan akhir pelaksanaan tahun anggaran 2025, maka disusunlah LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada awal tahun anggaran berkenaan. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun

berikutnya;

4. Bahan *re-asessment* terhadap perumusan isu-isu strategis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Bahan *re-asessment* terhadap perumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Bahan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2 Isu-isu Strategis

Permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi:

1. Keterbatasan sumberdaya (SDM dan Anggaran) di Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti program dan kegiatan;
2. Masih rendahnya perspektif masyarakat dan keluarga terhadap hak perempuan dan anak sehingga menyebabkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama pada jenis kasus kekerasan berbasis gender online dan kekerasan anak pada satuan pendidikan;
3. Masih kurangnya SDM pada UPTD PPA sebagai layanan terpadu untuk penanganan dan pendampingan korban;
4. Keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah karena kurangnya kapasitas kader politik perempuan serta persepsi masyarakat terhadap kader politik perempuan;

5. Implementasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak masih belum optimal;
6. Belum optimalnya keterisian dan pemanfaatan data pilah gender dan anak lintas sektoral;
7. Belum tersusunnya PJPk (Peta Jalan Pembangunan Kependudukan) sebagai penjabaran operasional GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) untuk 5 tahunan sebagai panduan arah kebijakan 5 tahunan untuk membangun keluarga berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan;
8. Belum semua kader kelompok UPPKA dan Tribina Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia (BKB, BKR dan BKL) berperan aktif dalam membina kelompok di wilayahnya karena keterbatasan kapasitas dan keterampilan kader serta masih rendahnya motivasi dalam berwirausaha dan pemasaran yang sulit yang dialami kelompok;
9. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat ber-KB;
10. Belum optimalnya pendataan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berjenjang dan tervalidasi.

Perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2024-2026, ditangani sebagai berikut :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Belum optimalnya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan anak.
2. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Belum optimalnya pengendalian penduduk, pelayanan KB serta peningkatan ketahanan keluarga dalam keluarga resiko stunting.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugasnya ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan sarana prasarana yang mendukung sebagai penggerak roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar per 31 Desember tahun 2025 sebanyak 42 orang, yang terdiri dari 23 orang PNS, 1 orang PPPK dan 18 tenaga non ASN.

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN			Non ASN			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	S2	-	4	4	-	-	-	4
2	S1	2	10	12	4	5	9	21
3	DIII	3	5	8	2	1	3	11
4	SLTA	-	-	-	5	1	6	6
Jumlah		5	19	25	11	7	18	42

Kondisi tersebut sudah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun kualitas SDM dari masing-masing unit kerja tetap perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan, karena tantangan kedepan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Penunjang Pemerintahan Daerah semakin kompleks dan dinamis. Sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Gol/Ruang PNS

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	6	1	5
3	III	14	3	11
4	IV	3	0	3
Jumlah		23	4	19

PPPK

No	Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	VII	1	1	-
Jumlah		1	1	0

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas, oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar didukung sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sumber Daya Modal

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Sarana dan Prasarana			
1	Gedung kantor (± 1.800 m ²)	1	Unit
2	Mobil Kepala Dinas	1	Unit
3	Mobil Operasional Dinas	4	Unit
4	Sepeda Motor Petugas PKB	45	Unit
5	Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN)	2	Unit
6	Komputer PC	76	Buah
7	Laptop	40	Buah
8	LCD	29	Buah
9	Kamera	3	Buah
10	Tablet HP dan PC	69	Buah
11	Scanner	5	Buah
12	AC	38	Buah
13	Printer	60	Buah

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Sarana Pelayanan			
1	Gedung Balai Penyuluh KB di Kecamatan	17	Unit
2	Gedung Gudang Alat Kontrasepsi	1	Unit
3	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN)	1	Unit
4	Mobil Pelayanan Operasi KB	1	Unit
5	Mobil Penerangan KB (Mupen)	2	Unit
6	Mobil Operasional KB (Truk Box)	2	Unit

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan sarana dan prasarana perlengkapan kantor cukup memadai, namun sebagian personal komputer harus *upgrade system*, mengingat beberapa personal komputer sudah lama sehingga perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi kinerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp 16.411.761.178,- dan dengan realisasi sebesar Rp 14.985.103.528,- (91,31%) yang digunakan untuk 9 (sembilan) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Berikut data anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.4

**Tabel 1.4 Data Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025**

No	Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	16.411.761.178
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	5.033.835.078
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.508.900
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.844.758.283
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.359.000
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.225.045
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.322.000
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.192.050
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.469.800
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	15.000.000
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	215.330.400
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.750.000
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115.070.000
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	34.510.400
4	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.000.000
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000
5	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	140.000.000

No	Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95.000.000
6	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	205.329.600
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.750.000
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.070.000
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.509.600
7	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	413.777.100
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	20.000.000
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	393.777.100
8	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.461.759.800
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.050.424.800
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.910.500.000
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.352.210.000
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	148.625.000
9	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.921.729.200
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	102.059.200
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	4.819.670.000

No	Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
		Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, Isu Strategis, Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran, Sistematika Penulisan, Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 dan Langkah Perbaikan Internal OPD.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD, Strategi dan Arah Kebijakan, Struktur Program dan Arah Kebijakan, Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja dan Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Inovasi dan Penghargaan. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, antara realisasi kinerja dengan realisasi nasional/regional
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.
4. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 terdapat 3 (tiga) saran/rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Tabel 1.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjut
1.	Memastikan target kinerja tahun berjalan tercapai dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat koordinasi pegawai di lingkup DP3APPKB dan monitoring kinerja melalui aplikasi smartsakip serta SIGA BKKBN dan SIGA PPA
2.	Menyusun dan menetapkan SOP/Pedoman Teknis Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Pengukuran Capaian Kinerja dengan berkoordinasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karanganyar.	Melaksanakan penyusunan, penetapan dan evaluasi atas SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja
3.	Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebelum ditetapkan	Menyusun dan mengajukan surat permintaan revidi laporan kinerja tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Langkah perbaikan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut penyelesaian terhadap isu strategis yang sudah dilakukan pada tahun

2025 sebagaimana berikut :

Tabel 1.6 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Peningkatan kegiatan advokasi dan KIE Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi semua lapisan masyarakat	1. Pemasangan baliho terkait Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  2. Advokasi pencegahan kekerasan kepada perangkat dan masyarakat se-Kecamatan Jenawi dan Kerjo 
2.	Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak	Sosialisasi “Bunda Cerdas” di Desa sebagai bimbingan untuk orang tua dalam cinta literasi dan hak anak sebagai upaya pencegahan kekerasan 
3.	Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan seperti Desa Layak Anak, DRPPA dan SRA untuk meminimalisir terjadinya kekerasan anak	Advokasi dan penguatan Desa Layak Anak dan DRPPA di desa 
4.	Meningkatkan peran Puspaga dalam hal pencegahan melalui edukasi dan parenting maupun penjangkauan	Melakukan edukasi kepada anak di sekolah dalam meningkatkan peran Puspaga

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kepada anak/keluarga yang bermasalah	
5.	Optimalisasi kegiatan program Bangga Kencana melalui advokasi dan KIE dan kegiatan pada Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	 Diselenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Karanganyar serta penggerakan penyuluhan di Kampung KB
6.	Penguatan melalui KIE ketahanan keluarga serta KIE melalui bina keluarga	1. Penyusunan dan pembagian leaflet sebagai KIE terkait ketahanan keluarga  2. Pelaksanaan internalisasi pengasuhan 1000 HPK bagi kader Bina Keluarga Balita 
7.	Peningkatan kualitas SDM dengan cara pelatihan bagi petugas pengelola dan pelaksana Program Pemberdayaan Perempuan dan Program Bangga Kencana	1. Peningkatan kualitas SDM kader PPKBD dalam Program Bangga Kencana dalam penyuluhan, pelayanan, serta pendampingan keluarga  2. Pelatihan Pengarusutamaan Gender 

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023, yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah.

Tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar secara umum wajib mendukung pencapaian arah kebijakan Pj Bupati Karanganyar Tahun 2025 yaitu “Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing” dengan fokus pada :

1. Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat ber KB dan kualitas keluarga sejahtera;
2. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar secara khusus juga mendukung pencapaian program Prioritas Pj Bupati Karanganyar Tahun 2025 yaitu :

1. Penanganan kemiskinan ekstrem
2. Penanganan dan pencegahan stunting
3. Peningkatan daya saing SDM yang berkarakter dan adaptif
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan

tugas, pokok dan fungsi yang melekat, yaitu:

1. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan;
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana;
4. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024 -2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,20	77,40	77,68
		Sasaran 1 : Meningkatkan	Indeks Pemberda	73,48	73,53	73,58

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun		
				2024	2025	2026
	dengan semangat kegotong royongan	kesetaraan dan keadilan gender dan anak	yaan Gender (IDG)			
		Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	2,16	2,13	2,1
		Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting	22,5	20	17,5
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	72	73	75
		Sasaran 4 : Meningkatkan tata kulturalitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73	73,25	73,5

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 melaksanakan 2 tujuan dan 4 sasaran beserta indikator sasaran, strategi dan kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif

untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD dengan efektif dan efisien.

Tabel 2.2

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,53
		Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	Angka	2,13
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kultas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,25

Dalam mencapai sasaran secara maksimal terdapat strategi dan arah kebijakan yang yang harus diwujudkan, yaitu:

Tabel 2.3

**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025**

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Sasaran 1 : Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Meningkatkan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan anak melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, peningkatan pengelolaan	1. Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG); 2. Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak; dan 3. Peningkatankualita s perlindungan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		system data gender dan anak, serta peningkatan pemenuhan hak anak	perempuan dan anak.
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	Meningkatkan kualitas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui peningkatan pemaduan kebijakan pengendalian penduduk, peningkatan ketersediaan dokumen informasi dan pemetaan pengendalian penduduk serta data kependudukan, peningkatan kesertaan KB MKJP, serta peningkatan penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB;	1. Peningkatan ketersediaan kebijakan dan dokumen informasi serta pemetaan pengendalian penduduk; dan 2. Peningkatan kesertaan KB.
	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting	Meningkatkan kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting melalui peningkatan ketahanan keluarga dengan keterlibatan dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL) dan peran PIK KRR dalam mendukung ketahanan remaja, serta peningkatan peran aktif dan penguatan kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga	1. Peningkatan keluarga sejahtera dengan keterlibatan dan peran aktif Tribina (BKB, BKR, BKL); 2. Peningkatan peran PIK-R dalam mendukung ketahanan remaja; 3. Peningkatan peran aktif dan penguatan kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, perlindungan

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja DP3APPKB. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak serta mewujudkan keluarga kecil berkualitas di Kabupaten Karanganyar.

1. Program Umum/Rutin

A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- i. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- iv. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

- i. Pengadaan Mebel
- ii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program yang Terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

A. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan Kegiatan :

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - ii. Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

B. Program Perlindungan Perempuan, dengan Kegiatan :

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - ii. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - i. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- C. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Kegiatan :
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- D. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan Kegiatan :
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan:
 - i. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

E. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan Kegiatan :

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - i. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA
 - ii. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

F. Program Pengendalian Penduduk, dengan Kegiatan :

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, sub kegiatan :
 - i. Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - ii. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - iii. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - iv. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

v. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan
Program Bangga Kencana

G. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
 - ii. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - iii. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - iv. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - v. Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan :
 - i. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - i. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - ii. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - iii. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - iv. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - v. Peningkatan Kesertaan KB Pria

- vi. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan sub kegiatan :
 - i. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - ii. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
- H. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan:
 - i. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 - ii. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))
 - iii. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))
 - iv. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))
 - b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan :
 - i. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional

Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- ii. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- iii. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
- iv. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- v. Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, ada komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud sebagai dampak dari kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen penerima dan pemberi amanah meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai upaya mendorong manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2025 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Pj. Bupati Karanganyar serta di ikuti dengan Perjanjian Kinerja Eselon III (Administrator/Kepala Bidang) sampai Eselon IV (Kepala Sub Bagian).

Guna mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 25 kegiatan serta 9 program, dimana kegiatan untuk sebanyak 7 kegiatan. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, secara lengkap tercantum pada tabel dibawah :

Tabel 2.4

**Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan 1 :			
	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,40
	Sasaran 1 :			
1.1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,53

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.2	Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	Angka	2,13
1.3	Meningkatkan kualitas Penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting	%	20
2	Tujuan 2 :			
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	73
	Sasaran 1 :			
2.1	Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,25

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan 1 :			
	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,40
	Sasaran 1 :			
1.1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,53
1.2	Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	Angka	2,13
1.3	Meningkatkan kualitas Penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting	%	20
2	Tujuan 2 :			
	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	86

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Sasaran 1 :			
2.1	Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	73,25

Adapun anggaran Program dan indikator kinerja yang menjadi bagian dari perjanjian kinerja pejabat administrator (Eselon III) dan Sub Bagian (Eselon IV) sebagai berikut :

Tabel 2.6

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	83 %	5.033.835.078
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	46 508 900
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan	4 laporan	3.844.758.283
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah	2 laporan	4.359.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Umum Urusan Pemerintahan	5 Kegiatan	346.225.045
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kinerja	13 Unit	36.322.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Kegiatan	420.192.050
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	42 Unit	335.469.800

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender	42 Lembaga	15.000.000
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan PUG	21 OPD	15.000.000
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan	0,0041%	215.330.400
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Selama 1 Tahun	4 Kegiatan	65.750.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	1 Layanan	115.070.000
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1 Kegiatan	34.510.400
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase OPD yang Memiliki Data Gender	12%	5.000.000
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengumpulan/Pengolahan Analisis Penyajian Data Gender Dalam 1 Tahun	1 Kegiatan	5.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa Layak Anak	6 Desa	140.000.000
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam Kelembagaan PHA pada Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	1 Kegiatan	45.000.000
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Peduli Anak yang Difasilitasi (Forum Anak, Sekolah Ramah Anak)	1 Lembaga	95.000.000
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak	0,0065%	205.329.600
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Selama 1 tahun	1 Kegiatan	55.750.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Dalam 1 tahun	1 Kegiatan	115.070.000
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	1 Kegiatan	34.509.600
7	Program Pengendalian Penduduk	ASFR	3,7	413.777.100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kualitas Penduduk	1 Kegiatan	20.000.000
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Perkiraan Pengendalian Penduduk	1 Kegiatan	393.777.100
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR Persentase Desa/kelurahan Memiliki kampung KB	71,9% 41,8%	5.461.759.800
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	1 Kegiatan	1.050.424.800
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang Difasilitasi	40 Orang	1.910.500.000
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	1 Kegiatan	2.352.210.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	1 Kegiatan	148.625.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Tribina Aktif	95,38%	4.921.729.200
	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kegiatan	102.059.200
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 Kegiatan	4.819.670.000

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar menggunakan aplikasi antara lain :

1. Aplikasi dari Kabupaten Karanganyar antara lain SmartSAKIP dan UPALEKA, yang wajib digunakan untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja OPD.
2. Aplikasi dari Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

- a. Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
Aplikasi ini mendorong adanya penyediaan data pilah gender dan anak yang dapat menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan terkait perempuan dan anak.
 - b. Aplikasi APEM Ketan mendorong penyediaan data kelompok rentan perempuan dan anak
3. Aplikasi dari Kementrian Pusat untuk mendukung kinerja PPPA dan Dalduk KB antara lain :
- a. Aplikasi New SIGA BKKBN merupakan aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat. Aplikasi ini digunakan untuk menunjang kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan KB (PLKB) sampai pada tingkat kecamatan dan desa.
 - b. Simfoni-PPA merupakan web/portal yang mendorong adanya penyediaan data terkait pencatatan korban dan kasus kekerasan yang dilaporkan dari Kementerian PPPA RI
 - c. SiPerindu merupakan portal web yang menyediakan informasi peringatan dini situasi kependudukan serta rekomendasi kebijakan, untuk kesiapsiagaan dan respon terhadap program pengendalian penduduk.
 - d. Web Kampung KB adalah portal website media informasi tentang Kampung Keluarga Berkualitas secara online, Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat universal, dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu didorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan kinerja tahun ke-2 dan terakhir pada periode Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 109,94 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, berdasarkan PermenPANRB No. 22 Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Perangkat Kinerja

No	Skala Nilai	Kategori
1	>100%	Istimewa
2	>85 – 100%	Baik
3	>60 – 85%	Butuh Perbaikan
4	>20 – 60%	Kurang
5	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Untuk mengukur keberhasilan atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat diantaranya melalui realisasi indikator-indikator yang ada pada sasaran strategisnya. Berikut adalah uraian capaian terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,40	78,67	101,64	77,68
1.1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) *	Indeks	73,53	74,40 *	101,18	73,58
1.2	Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	Angka	2,13	1,90	110,80	2,1
1.3	Meningkatkan kualitas Penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting *	%	20	10,54 *	147,3	17,5
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	86	85,58	99,51	75
2.1	Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP *	Nilai	73,25	72,65 *	99,18	73,5

* Capaian pada tahun 2024 karena capaian 2025 belum rilis

Berdasarkan tabel 3.2 dari empat Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar terdapat indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yang ditetapkan yaitu Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG), TFR, dan Prosentase keluarga berisiko stunting serta satu indikator kinerja yang belum mencapai / di bawah target yang ditetapkan.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2025, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, antara lain:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,40	78,67	101,64	Istimewa	BPS
1.1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) *	73,53	74,40 *	101,18	Istimewa	BPS
1.2	Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	2,13	1,90	110,80	Istimewa	Kemendukbangga/BKKBN
1.3	Meningkatkan kualitas Penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting *	20	10,54 *	147,3	Istimewa	DP3APP KB
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	86	85,58	99,51	Baik	KemenpanRB

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	% Capaian		
2.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP *	73,25	72,65 *	99,18	Baik	Inspektoral
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja					109,94	Istimewa	

* Capaian pada tahun 2024 karena capaian 2025 belum rilis

Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari indikator tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebesar 109,94% atau dengan kategori Istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1 indikator sasaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2 indikator sasaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta 1 indikator urusan penunjang menunjukkan kinerja Sangat Baik/Istimewa.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2025 menjelaskan tentang penjabaran indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar berdasarkan perkembangan hasil realisasi dan capaian kinerja sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Berikut ini tabel yang memaparkan pencapaian indikator kinerja menyesuaikan dengan sasaran strategis beserta realisasi dan capaian kinerjanya.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2023 – 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	NA	77,31	100	77,20	78,11	101,18	77,40	78,67	101,64
1.1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) *	74,95	73,69	98,32	73,48	71,65	97,51	73,53	74,40*	101,18
1.2	Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	2,5	2,16	113,6	2,16	1,94	128,24	2,13	1,90	110,80
1.3	Meningkatkan kualitas Penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting *	NA	9,78	100	22,5	10,54	153,16	20	10,54 *	147,3
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	NA	70,91	100	72	85,74	119,08	86	85,58	99,51
2.1	Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP *	79,35	69,65	87,78	73	71,15	97,47	73,25	72,65 *	99,18

* Capaian pada tahun 2024 karena capaian 2025 belum rilis

Dari hasil pengukuran atas realisasi dan capaian kinerja tahun 2023-2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Indikator IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun 2024. Hal ini dipengaruhi meningkatnya keterlibatan perempuan dalam parlemen meskipun di bawah 30% dan peningkatan ketrampilan, berorganisasi, dan pengambilan keputusan perempuan yang bekerja di sektor formal untuk meraih prestasi dengan kinerja optimum.
- b. Indikator TFR (Total Fertility Rate) mengalami kecenderungan tren capaian yang meningkat. Karena TFR merupakan indikator minimum jadi semakin rendah realisasinya maka semakin tinggi capaiannya. Hal ini berarti terdapat penundaan usia kawin dan penurunan jumlah kelahiran yang salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan alat kontrasepsi.
- c. Indikator persentase keluarga beresiko stunting juga mengalami kenaikan dari tahun 2024. Data Keluarga beresiko stunting berdasarkan data Pendataan Keluarga yang diverifikasi validasi setiap tahun mulai tahun 2022. Keluarga beresiko stunting yang tinggi berpotensi memiliki angka stunting yang tinggi pula tetapi dapat dicegah dengan pendampingan dan pemantauan oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga).
- d. Indikator Nilai SAKIP mengalami tren realisasi yang fluktuatif. Hal ini berarti perlu adanya peningkatan untuk kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja secara internal.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar periode RPD 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2025
dengan Target Renstra 2024 – 2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,67	77,68	101,27
1.1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) *	74,40 *	73,58	101,11
1.2	Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	2,13	1,90	110,80
1.3	Meningkatkan kualitas Penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting *	10,54 *	17,5	139,77
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	85,58	75	114,32
2.1	Meningkatkan tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP *	72,65 *	73,5	98,84

* Capaian pada tahun 2024 karena capaian 2025 belum rilis

Berdasarkan tabel 3.5 capaian kinerja tahun 2025 dari empat Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tiga indikator telah melebihi target yang ditetapkan yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), TFR, dan Prosentase keluarga berisiko stunting serta satu indikator kinerja yang belum mencapai target akhir dokumen perencanaan jangka menengah. Hal ini berarti realisasi kinerja indikator sudah menunjukkan progress positif terhadap capaian target akhir kinerja Renstra tahun 2024 – 2026.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi nasional/regional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja nasional dan regional/provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional/Regional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,67	74,77	75,90
1.1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) *	74,40 *	77,62 *	72,58 *
1.2	Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	1,90	2,11	2,03
1.3	Meningkatkan kualitas Penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting *	10,54 *	19,86 *	17,1 *
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	85,58	71,55 *	91,28
2.1	Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP *	72,65 *	64,23 *	70,75 *

* Capaian pada tahun 2024 karena capaian 2025 belum rilis

Berdasarkan tabel 3.6 capaian kinerja tahun 2025 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar jika dibandingkan dengan capaian secara Nasional dan Regional/Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dari seluruh indikator kinerja baik 1 indikator sasaran urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2 indikator sasaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta 1 indikator urusan penunjang capaiannya di atas dari capaian Nasional maupun Regional/Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan kinerja daerah yang sangat baik, yang berarti secara umum kinerja pembangunan, pelayanan publik, atau tata kelola pemerintahan telah terselenggara dengan baik dengan pengoptimalan potensi yang ada.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan maupun penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,40	78,67	101,64	peningkatan tiga dimensi dasar secara konsisten dan terintegrasi pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak	Adanya peningkatan di seluruh komponen dasar pembangunan manusia
1.1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) *	73,53	74,40 *	101,18	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam parlemen meskipun di bawah 30% dan peningkatan ketrampilan, berorganisasi, dan pengambilan keputusan perempuan yang bekerja di sektor formal untuk meraih prestasi dengan kinerja optimum	Komitmen pimpinan untuk mendorong implementasi PUG di daerah dan OPD serta diterbitkannya Intruksi Bupati Karanganyar Nomor 476/13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak
1.2	Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	2,13	1,90	110,80	Menurunnya angka kelahiran pada perempuan dengan adanya promosi penundaan usia kawin, promosi pemakaian dan efektivitas kontrasepsi, promosi menyusui, dan penguatan program KB	Telah diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor 476/5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dalam Percepatan Penurunan Stunting
1.3	Meningkatkan kualitas Penanganan	Prosentase keluarga berisiko	20	10,54 *	147,3	Adanya komitmen dan keseriusan Bupati beserta jajarannya yang berupaya dalam percepatan	Telah diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor 476/5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dalam

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	keluarga berisiko Stunting	stunting*				penurunan stunting serta efektifnya pendampingan dan pemantauan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) sehingga dilakukan pencegahan stunting	Percepatan Penurunan Stunting, Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.13.23/59 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Karanganyar, Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.13.23/177 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Karanganyar dan pembentukan TPPS pada tiap desa dan Kecamatan dan pembentukan TPK
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	86	85,58	99,51	Penyusunan rencana aksi yang dievaluasi setiap tribulan disertai dengan bukti pendukung	Telah dibentuk tim RB dan telah dilakukan pengukuran kinerja serta yang dilakukan setiap tribulan
2.1	Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP *	73,25	72,65 *	99,18	Telah dilaksanakan evaluasi internal dan monitoring pencapaian kinerja	Telah dibentuk tim SAKIP Perangkat Daerah dan telah dilakukan pengukuran kinerja yang dilakukan setiap tribulan

* Capaian pada tahun 2024 karena capaian 2025 belum rilis

Dari tabel tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah memetakan langkah-langkah solusi yang perlu dilakukan. Solusi tersebut diatas merupakan strategi peningkatan pemberdayaan perempuan, pelayanan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025, sumber dana dari APBD Murni Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 6.624.667.178,00 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 6.723.481.178,00. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) Tahun 2025 sebesar Rp. 400.660.000,00 dan terealisasi Rp. 289.733.150,00 (72,31%) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK NF BOKB) sebesar Rp. 9.287.620.000,00 dan terealisasi Rp. 9.124.376.026,00 (98,24%). Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 adalah Rp. 14.985.103.528,00 (91,31%) terjadi efisiensi Rp. 1.201.745.550,00 (8,69%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5/8 *100%
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	77,40	78,67	101,64				
1.1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	73,53	74,40	101,18	580.660.000	461.605.450	79,50	127,27 Effisien
1.2	Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	2,13	1,90	110,80	5.875.536.900	5.708.316.626	97,15	114,05 Effisien
1.3	Meningkatkan kualitas Penanganan keluarga berisiko Stunting	20	10,54	147,3	4.921.729.200	4.907.538.200	99,71	147,73 Effisien
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	86	85,58	99,51				
2.1	Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan	73,25	72,65	99,18	5.033.835.078	3.907.643.252	77,63	127,76 Effisien

* Capaian pada tahun 2024 karena capaian 2025 belum rilis

7. Analisis program yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	101,64				
1.1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) *	101,18 *	Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender	100%	Menunjang
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan perempuan	100%	Menunjang
				Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki Data Gender	396,83%	Menunjang
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah desa layak anak	100%	Menunjang
				Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase kasus kekerasan anak	87,69%	Menunjang
1.2	Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	110,80	Program Pengendalian Penduduk	ASFR	100,27%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR	92,27%	Menunjang
					Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB	239,23%	Menunjang
1.3	Meningkatkan kualitas Penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting *	147,3 *	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase tribina aktif	100,02%	Menunjang
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	99,51				
2.1	Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP *	99,18 *	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	66,67%	Menunjang

* % Capaian pada tahun 2024 karena capaian 2025 belum rilis

Dari 2 (tujuan) dan 4 (empat) sasaran yang telah direncanakan, seluruh kinerja program telah menunjang untuk pencapaian kinerja organisasi. Indikator dengan capaian yang tinggi antara lain yaitu Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender , Persentase kasus kekerasan perempuan, Persentase OPD yang memiliki Data Gender , Jumlah desa layak anak, Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB, dan Prosentase tribina aktif. Dengan capaian tertinggi indikator Persentase OPD yang memiliki Data Gender pada Program Pengelolaan Data Gender dan Anak, hal

ini berarti semakin banyak Perangkat Daerah yang mempunyai data pilah gender yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Untuk indikator yang belum tercapai yaitu Prosentase kasus kekerasan anak, Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR, dan Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya. Indikator prosentase kasus kekerasan anak pada Program Perlindungan Khusus Anak belum mencapai target karena pada tahun 2025 telah terbentuk UPTD PPA sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami dan melaporkan. Oleh karena itu, untuk pendampingan dan penjangkauan kasus kekerasan pada anak semakin terpadu. Sedangkan untuk indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) belum mencapai target karena terdapat kendala penginputan pelayanan KB pada sistem (SIGA BKKBN) pada semester 2 sehingga membuat anomali data.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam realisasi anggaran ini memuat penjelasan terkait pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja dan ditetapkan pada APBD Kabupaten Karanganyar. Penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2024 berdasar Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran (Rp)
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,033,835,078	3,907,643,252	77.63	1,123,191,826
I	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46,508,900	46,059,400	99.03	449,500
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39,399,000	39,119,000	99.29	280,000
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	7,109,900	6,940,400	97.62	169,500

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran (Rp)
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,844,758,283	2,743,869,602	71.37	1,100,888,681
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,834,758,283	2,734,722,452	71.31	1,100,035,831
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,000,000	9,147,150	91.47	852,850
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4,359,000	4,232,250	97.09	126,750
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,359,000	4,232,250	97.09	126,750
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346,225,045	336,452,471	97.18	9,772,574
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,434,600	9,396,600	99.60	38,000
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,245,000	20,190,000	79.98	5,055,000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,599,750	7,454,750	98.09	145,000
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13,000,000	12,745,000	98.04	255,000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290,945,695	286,666,121	98.53	4,279,574
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	36,322,000	36,222,000	99.72	100,000
11	Pengadaan Mebel	2,250,000	2,250,000	100.00	-
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,072,000	33,972,000	99.71	100,000
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420,192,050	410,757,129	97.75	9,434,921
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,372,450	13,362,650	99.93	9,800
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109,616,200	101,446,079	92.55	8,170,121
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297,203,400	295,948,400	99.58	1,255,000
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335,469,800	330,050,400	98.38	5,419,400
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175,969,800	172,100,400	97.80	3,869,400
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,500,000	19,165,000	98.28	335,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran (Rp)
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140,000,000	138,785,000	99.13	1,215,000
B	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	15.000.000	14.252.750	95,02	747.250
VIII	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenanga	15,000,000	14,252,750	95.02	747,250
19	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	5,000,000	4,625,000	92.50	375,000
20	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	10,000,000	9,627,750	96.28	372,250
C	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	215.330.400	140.288.800	65,15	75.041.600
IX	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65,750,000	64,631,750	98.30	1,118,250
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50,750,000	50,750,000	100.00	-
22	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15,000,000	13,881,750	92.55	1,118,250
X	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115,070,000	41,146,650	35.76	73,923,350
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115,070,000	41,146,650	35.76	73,923,350
XI	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34,510,400	34,510,400	100.00	-
24	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34,510,400	34,510,400	100.00	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran (Rp)
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
D	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.000.000	5.000.000	100,00	-
XII	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000	5,000,000	100,00	-
25	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	5,000,000	5,000,000	100,00	-
E	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	140.000.000	134.187.800	95,85	5.812.200
XIII	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45,000,000	41,101,800	91.34	3,898,200
26	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45,000,000	41,101,800	91.34	3,898,200
XIV	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95,000,000	93,086,000	97.99	1,914,000
27	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95,000,000	93,086,000	97.99	1,914,000
F	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	205.329.600	167.876.100	81,76	37.453.500
XV	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55,750,000	55,300,000	99.19	450,000
28	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	5,000,000	4,550,000	91.00	450,000
29	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50,750,000	50,750,000	100.00	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran (Rp)
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
XVI	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115,070,000	78,066,500	67.84	37,003,500
30	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	115,070,000	78,066,500	67.84	37,003,500
XVII	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34,509,600	34,509,600	100.00	-
31	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	34,509,600	34,509,600	100.00	-
G	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	413.777.100	407.430.850	98,47	6.346.250
XVII	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	20,000,000	19,931,500	99.66	68,500
32	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	20,000,000	19,931,500	99.66	68,500
XIX	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	393,777,100	387,499,350	98.41	6,277,750
33	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	25,720,000	24,028,750	93.42	1,691,250
34	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	8,187,100	8,185,350	99.98	1,750
35	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	138,600,000	138,581,200	99.99	18,800
36	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	208,406,000	203,840,050	97.81	4,565,950
37	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	12,864,000	12,864,000	100.00	-
H	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.461.759.800	5.300.885.776	97,05	160.874.024
XX	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,050,424,800	1,026,149,976	97.69	24,274,824

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran (Rp)
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
38	Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	680,000,000	656,655,176	96.57	23,344,824
39	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)	255,000,000	255,000,000	100.00	-
40	Promosi Dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	30,632,000	30,632,000	100.00	-
41	Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Program bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4,792,800	4,342,800	90.61	450,000
42	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80,000,000	79,520,000	99.40	480,000
XXI	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/Petugas Lapangan Kb (PKB/PLKB)	1,910,500,000	1,910,383,050	99.99	116,950
43	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,910,500,000	1,910,383,050	99.99	116,950
XXII	Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah	2,352,210,000	2,215,774,000	94.20	136,436,000
44	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56,700,000	51,330,000	90.53	5,370,000
45	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,868,190,000	1,752,019,000	93.78	116,171,000
46	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5,000,000	0	0.00	5,000,000
47	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	37,400,000	36,824,000	98.46	576,000
48	Peningkatan Kesertaan KB Pria	99,920,000	92,879,000	92.95	7,041,000
49	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	285,000,000	282,722,000	99.20	2,278,000
XXIII	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	148,625,000	148,578,750	99.97	46,250

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran (Rp)
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
50	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	15,375,000	15,375,000	100.00	-
51	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	133,250,000	133,203,750	99.97	46,250
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.921.729.200	4.907.538.200	99,71	14.191.000
XXIV	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	102,059,200	87,968,200	86.19	14,091,000
52	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	11,387,200	11,387,200	100.00	-
53	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK6R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	7,448,000	7,448,000	100.00	-
54	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK6R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	71,800,000	57,859,000	80.58	13,941,000
55	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK6R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	11,424,000	11,274,000	98.69	150,000
XXV	Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	4,819,670,000	4,819,570,000	100.00	100,000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Sisa Anggaran (Rp)
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
56	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8,250,000	8,250,000	100.00	-
57	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62,620,000	62,566,000	99.91	54,000
58	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	10,000,000	9,954,000	99.54	46,000
59	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2,154,000,000	2,154,000,000	100.00	-
60	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2,584,800,000	2,584,800,000	100.00	-
Total		16.411.761.178	14.985.103.528	91,31	1,426,657,650

3.3 INOVASI

Pada Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar menciptakan beberapa inovasi-inovasi untuk menunjang capaian kinerjanya, antara lain:

1. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar menginisiasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai gerakan bersama yang masif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Dengan pendewasaan usia perkawinan diharapkan tidak hanya menunda usia perkawinan tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama juga terjadi pada usia yang cukup dewasa karena telah diberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi.

Pendewasaan usia perkawinan dilaksanakan dengan memanfaatkan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) melalui metode pendekatan dan pemanfaatan teknologi informasi kepada remaja untuk menciptakan generasi berencana yang menjamin kehidupan yang lebih berkualitas.

2. GEMPA (GenRe Menyapa)

GEMPA (Generasi Berencana Menyapa) merupakan program yang melibatkan peran aktif Duta dan Forum Generasi Berencana untuk melakukan kunjungan langsung ke sekolah, komunitas, dan desa-desa di wilayah Karanganyar. Dengan adanya inovasi ini agar mendorong remaja agar memiliki wawasan yang komprehensif dalam menyusun rencana hidup, menjauhi Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (seks bebas, HIV/AIDS, dan napza), serta membentuk karakter yang tangguh dan berdaya saing.

Dengan inovasi ini untuk menurunkan Angka Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah, dengan meningkatnya literasi reproduksi dan nilai-nilai perencanaan hidup, berkurangnya perilaku berisiko dan kenakalan remaja program ini menjadi wadah preventif yang efektif dalam menekan perilaku menyimpang sehingga terbentuk Generasi Muda yang Sehat, Mandiri, dan Produktif.

3.4 PENGHARGAAN

Penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025, yaitu:

1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Karanganyar meraih Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya tahun 2025. Kabupaten Layak anak mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.



Gambar 3.1 Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak

2. Faskes Swasta Terbaik ke-2 Nasional

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Klinik Swasta yang menjadi mitra dalam melakukan pelayanan KB, Kemendukbangga/BKKBN mengadakan Kegiatan Apresiasi PERan Klinik Swasta dalam Peningkatan Pelayanan KB. Kabupaten Karanganyar mengirimkan wakil faskes yaitu Klinik Griya Sehat, yang menjadi juara tingkat Provinsi Jawa Tengah yang kemudian mampu meraih Terbaik II Nasional.



Gambar 3.2 Piagam Penghargaan Klinik Swasta

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Karanganyar dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 – 2026. Dengan prinsip pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana yang efektif dan efisien, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya berhasil, hal itu dapat diukur dari seluruh target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dapat direalisasikan sesuai harapan dengan kategori Istimewa/Sangat Baik. Hal tersebut didukung data hasil pengukuran pencapaian sasaran rata-rata capaiannya sebesar (109,94%), dengan rincian sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak, dengan capaian sebesar 101,18% atau kategori Istimewa/Sangat Baik;
- b. Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB, dengan capaian sebesar 108,92% atau kategori Istimewa/Sangat Baik;
- c. Meningkatkan kualitas Penanganan keluarga berisiko Stunting, dengan capaian sebesar 147,3% atau kategori Istimewa/Sangat Baik;
- d. Meningkatkan tata kelola tata laksana pemerintahan, dengan capaian sebesar 103,81% atau kategori Istimewa/Sangat Baik;

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari realisasi capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan mitra kerja/stakeholder. Beberapa inovasi baik instrument pendukung kinerja maupun inovasi program/kegiatan yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sudah mampu untuk menyelesaikan beberapa isu strategis

yang ada terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana walaupun belum optimal.

Permasalahan yang masih ada antara lain :

1. Pemberdayaan ekonomi perempuan belum ditindaklanjuti secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran serta kurangnya akses permodalan dan pemasaran.
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual.
3. Masih rendahnya manfaat ber-KB Pasangan Usia Subur (PUS)
4. Belum tersusunnya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen strategis lima tahunan operasional Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
5. Belum tersusunnya RAD PUG (Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender) dan RAD KLA (Rencana Aksi Daerah Kota/Kabupaten Layak Anak) serta mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan;
6. Kurangnya keaktifan dan motivasi kader tribina dalam membina keluarga anggota yang menjadi kelompoknya;

4.2 Rekomendasi

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Mendorong pencegahan kekerasan seksual perempuan dan anak secara kolaboratif;
2. Melaksanakan penguatan lembaga UPTD PPA sebagai pusat layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Meningkatkan sosialisasi KIE KB serta peran dan fungsi PPKBD maupun Sub PPKBD sebagai upaya mendorong peningkatan kesertaan KB;
4. Menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan mengintegrasikan Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) 5 pilar kedalam dokumen perencanaan berjenjang;

5. Meningkatkan kapasitas dan motivasi kader Tribina (BKB, BKR, BKL) sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga yang menjadi kelompok binaannya;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun kedepan.

Karanganyar, Februari 2026

KEPALA DP3APPKB

KABUPATEN KARANGANYAR



SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680604 199503 2 003

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025**
- 2. RKT Tahun 2025**
- 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2025**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSMANTO, S.H., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.
Jabatan : BUPATI KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI KARANGANYAR

H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.

Karanganyar, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,
KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR

RUSMANTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199303 1 016

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ITA KUSUMAWATI, M.Kes.
Jabatan : PTL SEKRETARIS DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. TITIS SRI JAWOTO
Jabatan : PTL KEPALA DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR

dr. ITA KUSUMAWATI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 198603 1 003

Karanganyar, Oktober 2025

Pihak Pertama,
PTL SEKRETARIS DINAS

dr. ITA KUSUMAWATI, M.Kes.
Pembina
NIP. 19740530 200501 2 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,53
2	Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	2,13
3	Meningkatkan kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting	20
4	Meningkatkan tata kelola tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73,25

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.983.667.178	APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 15.000.000	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp 230.330.400	APBD APBN
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 50.000.000	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 5.000.000	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 140.000.000	APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 215.329.800	APBD APBN
8	Program Pengendalian Penduduk	Rp 383.148.000	APBD APBN
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5.361.672.000	APBD APBN
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 4.928.800.000	APBD APBN
	Jumlah	Rp16.312.947.178	

Pihak Kedua,
BUPATI KARANGANYAR

H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.

Karanganyar, 03 Maret 2025

Pihak Pertama,
KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR

RUSMANTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650810 199303 1 016

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG SEKRETARIAT
DP3APPKB KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan	4 Laporan
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah	2 Laporan
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertaksana Administrasi Kepegawaian Urusan Pemerintahan	1 Kegiatan
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksana Administrasi Umum Urusan Pemerintahan	5 Kegiatan
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kinerja	3 Unit
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksana Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Kegiatan
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	42 Unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.508.900	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.844.758.283	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.359.000	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.225.045	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.192.050	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.469.800	APBD
	JUMLAH	4.997.698.078	

Pihak Kedua,
KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR

dr. ITA KUSUMAWATI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 198603 1 003

Karanganyar, Oktober 2025

Pihak Pertama,
PTL SEKRETARIS DINAS

dr. ITA KUSUMAWATI, M.Kes.
Pembina
NIP. 19740530 200501 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : IDA UTAMI, S.E., M.M.
 Jabatan : PI. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Selanjutnya disebut pihak pertama
 Nama : Drs. TITIS SRI JAWOTO
 Jabatan : PI. KEPALA DP3APPK KABUPATEN KARANGANYAR
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, Oktober 2025
 Pihak Kedua,
 PI. KEPALA DP3APPK
 KABUPATEN KARANGANYAR

 IDA UTAMI, S.E., M.M.
 Perata: Tingtari
 NIP. 1960923 19803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DP3APPK KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan PUG	21 Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	42 Dokumen
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kabupaten/Kota	30 Orang
2.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Selama 1 Tahun	4 Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Pencegahan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Pencegahan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Pencegahan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Pencegahan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang
3.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayih Kertjaya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	1 Layanan
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayih Kertjaya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayih Kertjaya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan
4.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyalinan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengumpulan/Pengolahan Analisis Penyalinan Data Gender Dalam 1 Tahun	1 Kegiatan
5.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam Mewujudkan PHA pada Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	1 Kegiatan
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	6 Organisasi
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Peduli Anak yang Difasilitasi Forum Anak, Sekolah Ramah Anak	1 Lembaga
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	1 Dokumen

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan
6.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pada Anak Selama 1 tahun	1 Kegiatan
	Pengutan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kesetaraan layak Anak, desakusutuhan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu	1 Kegiatan
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan (program) kegiatan pencegahan KIA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan (program) kegiatan pencegahan KIA	72 Orang
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Dalam 1 tahun	1 Kegiatan
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Layanan
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	1 Kegiatan
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang telah mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	5.000.000	APBD

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	APBD
2.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66.750.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.750.000	APBN APBD
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Pencegahan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	APBD
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115.070.000	APBN APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.070.000	APBN APBD
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.510.400	APBN APBD
3.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayih Kertjaya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	APBD
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayih Kertjaya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	APBD
4.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyalinan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	APBD
5.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	APBD

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Kabupaten/Kota		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000	APBD
6.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.750.000	
	Pengutan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kesetaraan layak Anak, desakusutuhan layak Anak, dan DRPPA	5.000.000	APBD
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan (program) kegiatan pencegahan KIA	50.750.000	APBN APBD
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.070.000	APBN APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	115.070.000	APBN APBD
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.509.600	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Kabupaten/Kota	34.509.600	APBD
	JUMLAH	580.606.000	

Karanganyar, Oktober 2025
 Pihak Kedua,
 PI. KEPALA DP3APPK
 KABUPATEN KARANGANYAR

 IDA UTAMI, S.E., M.M.
 Perata: Tingtari
 NIP. 1960923 19803 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : SURAHMI, S.E., M.M.
 Jabatan : PI. KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. TITIS SRI JAWOTO
 Jabatan : PI. KEPALA DP3APPK KABUPATEN KARANGANYAR
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karanganyar, Oktober 2025
 Pihak Kedua,
 PI. KEPALA DP3APPK
 KABUPATEN KARANGANYAR

 SURAHMI, S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710628 199312 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DP3APPK KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	1 kegiatan
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 laporan
2.	2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang Difasilitasi	40 orang
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1827 orang
3.	3. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 kegiatan
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan)	2 laporan
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	4 laporan
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha)	5 unit

[illegible]

Pihak Kedua,
PIH. KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR



ORE. JIJS SRI JAWOTO
Peminda Utama Muda
NIP. 19660923 196603 1 003

DR. HJIS SRI JAWOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 198603 1 003

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pemadah Perkiraan Pengendalian Penduduk Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	112.750.000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	112.750.000	APBN
2	Pengendalian dan Distribusi/bantuan Keluarga dari Obat Kontrasepsi Jangka Pendek/Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.352.210.000	
	Pengendalian Distribusi Obat dan Obat Kontrasepsi dari Sarana Pelayanan Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya	50.700.000	APBN
	Pengembangan Kesenakan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.868.110.000	APBN APBD
	Penyediaan Dukungan Ayoan Komplikas Berat dan Kondisi Pengawasan KB	5.000.000	APBN
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya	37.400.000	APBN APBD
	Promosi dan Konseling JI/ Pasca Penatalan dan Pasca Keguguran	285.000.000	APBN
	Pengelolaan Kesehatan KB Pita	99.500.000	APBD
	JUMLAH	2.464.960.000	

Pihak Kedua,
Pit. KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR

 Dra. TITIS SRI JAWOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680923 198603 1 003

Drs. TITIS SRIJAWOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680923 198603 1 003

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
		(Pembangunan Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh tokoh advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi
4.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/Petugas KB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang Dilatifikasi	40 Orang
	Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (MP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (MP)	1.82 Orang
5.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembiayaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembiayaan Kesertaan Ber-KB	1 Kegiatan

Kabupaten/Kota	
Pelaksanaan Pelayanan	

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	2	3	4
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	49 Kampung

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Paduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	15.987.500	
	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	15.987.500	APBD
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	352.927.100	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	25.720.000	APBD
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	8.187.100	APBD
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	112.750.000	APBN
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	193.406.000	APBN
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	12.864.000	APBD
3.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	795.424.800	

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	580.000.000	APBN
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	30.632.000	APBN
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.792.800	APBD
	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	APBD
4.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.910.500.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.910.500.000	APBD APBN
5.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	148.625.000	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	15.375.000	APBD
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	133.250.000	APBD APBN
	JUMLAH	3.223.464.400	

Pihak Kedua,
KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR


Dns. Uris Sri Jawoto
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 196603 1 003

Karanganyar, Oktober 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK


SURAHMI S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19710528 199312 2 001

PERJANJIAN KERJASAMA KERUKUN PERUBAHAN
DINAS PEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KARANGANYAR



PERJANJIAN KERJASAMA TAHUN 2025

Dalam rangka memajukan hubungan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. H. KUSUMAWATI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ditandatangani di pihak pertama

Nama : DR. H. KUSUMAWATI, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ditandatangani di pihak kedua

Pihak pertama dan kedua akan melakukan segala bentuk kerjasama yang selaras dengan peraturan, nilai, nilai-nilai, visi, misi, dan tujuan organisasi masing-masing yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kerjasama ini merupakan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang bersangkutan.

Pihak kedua akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja instansi. Melalui dokumen ini, kedua belah pihak akan melakukan hubungan yang efektif dalam rangka pemenuhan pengendalian penduduk.

Karanganyar, Oktober 2025

Pihak Kedua,
DR. H. KUSUMAWATI, S.Pd, M.Pd
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pihak Pertama,
DR. H. KUSUMAWATI, S.Pd, M.Pd
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan	4 Dokumen
2.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
3.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
4.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
5.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
6.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
7.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
8.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
9.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
10.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
11.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
12.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
13.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
14.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
15.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
16.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
17.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
18.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
19.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
20.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan
21.	Penyusunan Program Kerja	Jumlah Laporan Penyusunan	4 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
2.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
3.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
4.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
5.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
6.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
7.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
8.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
9.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
10.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
11.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
12.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
13.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
14.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
15.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
16.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
17.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
18.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
19.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
20.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD
21.	Penyusunan Program Kerja	1.000.000	APBD

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT PERANGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DP3APPKB
Tahun : 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)		(5)
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan		Indeks Pembangunan Manusia	77,4
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,53
		Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	2,13
		Meningkatkan kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting	20,0
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi	73
		Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73

Karanganyar, Januari 2025
Kepala DP3APPKB
Kabupaten Karanganyar



RUSMANTO, S.H., M.M.
Pemula Utama Muda
NIP. 19650810 199303 1 016

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun

: DP3APPKB
: 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TUJUAN				
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,40	78,67	101,64
	SASARAN				
	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,53	74,40 *	101,18
	Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	2,13	1,90	110,80
	Meningkatkan kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase keluarga berisiko stunting	20	10,54 *	147,30
	TUJUAN				
2	Meningkatkan tata pemerintah yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	86	85,58	99,51
	SASARAN				
	Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas	Nilai SAKIP	73	72,65 *	99,18

* Capaian tahun 2024 karena capaian tahun 2025 belum ada

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025

: Rp. 16.411.761.178,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025

: Rp. 14.985.103.528,-

% Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025

: 91,31 %

Karanganyar, Desember 2025

Plt. Kepala DP3APPKB

Kabupaten Karanganyar


Drs. Titis Sri Jawoto
 Penerima Utang Muda
 NIP. 19600523 198603 1 003